

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng)

Andi Alif Firmansyah¹, dan Masdar Ryketeng²

¹Program Studi Akuntansi, STIE Amkop Makassar

²Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Regional financial supervision is related to the process of activities aimed at ensuring that regional government financial management runs in accordance with the plans and provisions of the applicable laws and regulations related to all regional rights and obligations within the framework of governance that can be valued in money including all forms of wealth that are related to regional rights and obligations. The purpose of this study was to determine the partial and simultaneous effect of the variables studied using a quantitative approach with a total sample of 16 people in each SKPD of Bantaeng Regency using multiple regression analysis method. The findings of this study indicate that there is a positive and significant effect of human resource competence on report quality, while the financial internal control system has a positive and significant effect on the quality of financial reports and regional financial supervision has a positive and significant effect on the quality of financial reports.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 16 orang di setiap SKPD Kabupaten Bantaeng dengan metode analisis regresi berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan, sedangkan sistem pengendalian intern keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan serta pengawasan keuangan daerah pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: sumber daya manusia, pengendalian intern, keuangan daerah

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan.
E-mail address: masdar.ryketeng@unm.ac.id

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan sentralisasi dulunya diterapkan di Indonesia yang dalam artian bahwa segala kebijakan ataupun aturan baik terkait dengan sistem maupun segala keputusan dititikberatkan dipusat yang kemudian juga diterapkan diseluruh daerah. Akan tetapi pada saat ini, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diubahlah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi demi keefektifan sistem pemerintahan yang tidak hanya berpusat pada pemerintahan pusat namun juga menitikberatkan pada pemerintahan daerah. Terwujudlah otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan desentralisasi. Otonomi daerah inilah pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam pengelolaan keuangan.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam memberikan perkembangan opini wajar tanpa pengecualian.

2. Kajian Pustaka

1. Kualitas Laporan keuangan

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pengertian laporan keuangan pemerintah yang disampaikan oleh Baldrick (2015:2) laporan keuangan pemerintah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sementara menurut M.Yusuf (2013:1) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan kualitas laporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Erlina,dkk,2015:20) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan secara khusus tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

3. Sumber daya manusia

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu tertentu (Moehariono,2012:5). Adapun menurut Ardeno Kurniawan (2015:18) mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Narawi dalam Chr.Jimmy L. Gaol (2015) sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai asset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya.

4. Sistem pengendalian intern

Menurut Mulyadi (2010:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan 14 keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi,2011:251).

5. Tujuan sistem pengendalian intern

PP No.60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 15 pelaporan keuangan,

pengamanan aset dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

6. Pengawasan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat mengontrol kegiatan ODP dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Adapun menurut Soony Sumarsono, (2010) pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari 19 lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah

3. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dengan demikian dalam rancangan korelasional peneliti melibatkan paling tidak dua variabel (Nursalam,2003:84). Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat dan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Alasannya karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di satuan kerja perangkat daerah kabupaten Bantaeng.

b. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor-Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng. Penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022.

c. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bantaeng yang berjumlah total 18 SKPD yang terdiri dari dinas-dinas dan inspektorat

d. Sampel

Responden dalam penelitian berjumlah 18 dari setiap SKPD di Kabupaten Bantaeng. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah

1. Satuan kerja perangkat daerah yang dijadikan tempat penelitian meliputi perangkat daerah kabupaten, dinas-dinas, inspektorat, dan bagian keuangan sekretaris daerah. Pembatasan ini didasari aspek kemudahan dalam menjangkau informasi yang dibutuhkan sehingga diharapkan pengumpulan data mudah, efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Responden adalah staf akuntansi/tata usaha keuangan setiap SKPD Kabupaten Bantaeng yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan

e. Teknik Sampel

Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti.

f. Instrument Penelitian

Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan penelitian selanjutnya. Setelah ditetapkan item-item dari variabel yang diteliti, maka langkah selanjutnya mengadakan pengukuran atas variabel. Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan lima alternative jawaban, yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2009;93). Responden dapat memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan keadaan subyek.

- Sangat Tidak Setuju (STS)
- Tidak Setuju (TS)
- Ragu-ragu (RR)
- Setuju (S)
- Sangat setuju (SS)

Operasional Variabel

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SKALA UKUR
1.	Kompetensi sumber daya manusia (X1)	Keterampilan, pengetahuan dan sikap	Skala likert
2.	Sistem pengendalian intern (X2)	Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan	Skala likert
3.	Pengawasan keuangan daerah (X3)	Akurat, tepat waktu, objektif dan kompherensif, dan dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi	Skala likert
4.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Andal, relevan, dapat	Skala likert

g. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada semua responden untuk dijawab.
- Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literature-literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Deskripsi responden

Responden dalam penelitian ini merupakan staf akuntansi/ tata usaha keuangan dari setiap SKPD Kabupaten Bantaeng yang meliputi kepala dan staf sub bagian keuangan/ penatausahaan keuangan yang berjumlah 18 responden dari setiap SKPD di Kabupaten Bantaeng.

Daftar Distribusi Kuesioner Penelitian
SKPD Kabupaten Bantaeng

NO	PERANGKAT DAERAH	KUESIONER YANG DIBAGIKAN	KUESIONER YANG DIKEMBALIKAN
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1	1
2.	BKPSDM	1	1
3.	Dinas Kesehatan	1	1
4.	Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman & Pertanahan	1	1
5.	Dinas Sosial	1	1
6.	Kantor Pertanahan	1	1
7.	BPBD	1	1
8.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Negara	1	0
9.	Dinas Tenaga Kerja &	1	1

	Perindustrian		
10.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	1	1
11.	Inspektorat	1	0
12.	Dinas Perikanan & Kelautan	1	1
13.	Dinas PMD, PP & PA	1	1
14.	BAPPEDA	1	1
15.	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan	1	1
16.	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	1	1
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1
18.	Dinas Pariwisata	1	1
	TOTAL	18	16

b. Deskripsi kelompok usia umur

Deskripsi responden berdasarkan usia/umur dilakukan untuk mengetahui tingkat umur responden yang berada di SKPD Kabupaten Bantaeng. Maka presentase berdasarkan usia responden dapat dilihat sebagai berikut.

Umur Responden

Umur	Frekuensi	Presentase (%)
31-40 tahun	3	18,75%
41-50 tahun	4	25%
51-60 tahun	9	56,25%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 16 responden yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, mayoritas didominasi di SKPD Kabupaten Bantaeng oleh usia 51-60 tahun yaitu sebanyak 9 orang, 41-50 tahun yaitu sebanyak 4 orang dan usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 3 orang.

c. Deskripsi statistik

Deskripsi statistik memberikan gambaran mengenai temuan peneliti terkait dengan deskripsi masing-masing item variabel yang diajukan. Untuk lebih jelasnya, deksripsi statistik masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan serta secara simultan pada variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil karakteristik responden diketahui 16 orang berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Bantaeng dapat diterima lewat pembuktian dengan menggunakan uji F atau uji simultan yang menunjukkan sig lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$ dan f-hitung lebih besar dari f-tabel yaitu $11,821 > 3,41$ sehingga H3 dapat diterima. 56 5.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia T

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,394 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel kompetensi sumber daya manusia dan variabel bebas yang lain diasumsikan konstan, maka akan menyebabkan peningkatan variabel kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebesar 0.394 satu satuan. Uji t kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Nilai t-hitung pada variable kompetensi sumber daya manusia (X1) adalah $0,860 < 1,78229$ dengan tingkat signifikan 0,407. Maka secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dapat diterima sebagai sebuah kebenaran lewat pembuktian dengan menggunakan uji parsial atau uji t.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,377 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel sistem pengendalian intern dan variabel bebas yang lain diasumsikan konstan, maka akan menyebabkan peningkatan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebesar 0.377 satu satuan. Uji t sistem pengendalian intern (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Nilai t-hitung pada variable sistem pengendalian intern (X2) adalah $0,989 < 1,78229$ dengan tingkat signifikan 0,342. Maka secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 2 yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dapat diterima sebagai sebuah kebenaran lewat pembuktian dengan menggunakan uji parsial atau uji t.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,088 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel pengawasan keuangan daerah dan variabel bebas yang lain diasumsikan konstan, maka akan menyebabkan peningkatan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebesar 0.088 satu satuan. Uji t pengawasan keuangan daerah (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Nilai t-hitung pada variable pengawasan keuangan daerah (X3) adalah $0,271 < 1,78229$ dengan tingkat signifikan 0,791. Maka secara parsial variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hipotesis 3 yaitu pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dapat diterima sebagai sebuah kebenaran lewat pembuktian dengan menggunakan uji parsial atau uji t.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah sebanyak 16 responden, maka lewat dari uraian dan penjelasanpenjelasan sebelumnya maa dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun secara simultan.

6. Saran

Beberapa saran yang hendak penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagi perangkat daerah Kabupaten Bantaeng hendaknya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia disetiap SKPD, perlunya pemeriksaan dan pengontrolan secara insten di pengendalian intern serta perelesasiaan APBD sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah demi peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin saja juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

7. Daftar pustaka

Arfianti Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang), Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019. Bantaeng, 2020.

Evicahyani,S.I.,& Setiawina (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tabanan.

Inasari, Reni Realita (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Malle, Syarif Syahrir. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Uin Alauddin Makassar
- Merliana (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat). UIN Raden Intan Lampung.
- Prabawati, Ulfa Suluh.(2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rangkuti, Ahmad Zubeir. (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi SIMDA Sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerinah Kabupaten Mandaliling Natal. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani. (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
- Anonim, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.